



Available online at website :

<http://ejournal.stialppn.ac.id/index.php/index/index>

Jurnal Public Administration, Bussiness and Rural Development Planning

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Siti Osa Kosassy¹, Marwandizal², Prissilia³

^{1,2}Dosen Program Studi Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

³Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

E-mail: : sitiosa@stia-lppn.ac.id¹, marwandizal@stia-lppn.ac.id²
prissilia528@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of Presidential Regulation No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting in the Mentawai Islands Regency, especially in the Betumonga area. This research is motivated by stunting problems which are increasing in the Mentawai Islands Regency, especially in the Betumonga Area. This research uses qualitative methods by conducting field surveys and interviews with related parties such as service staff and local service heads. Based on the results of interviews using the theory presented by Marile a Grindle, the results obtained from the implementation of Presidential Decree number 72 of 2021 concerning the acceleration of stunting reduction in the Mentawai Islands Regency in the Betumonga area can be said to have been implemented well out of a total of 105 achievement indicators in Presidential Decree number 72 of 2021, 27 indicators which is not fulfilled properly and there are only 80 indicators that are fulfilled. achievement indicators that have not met targets. 27 indicators that have not been met, several indicators that are not yet close to the development line and are not in line with the targets for 2024 in the Betumonga area, the government has made efforts to overcome the problem of stunting, but the community still sometimes does not want to accept the reality and some still refuse to handle stunting prevention. The research results show that this incident is caused by the need for sustainable programs, especially in remote areas that are difficult to reach due to their wide reach so that access to transportation is limited. The implementation of Presidential Decree number 72 of 2021 in the Mentawai Islands Regency requires additional rules or efforts in handling stunting cases related to the determinant factors that cause stunting for families at risk of stunting, especially in special cases such as the Betumonga area as well as additional regulations for preventing stunting.

Keywords: Implementation of Presidential Decree no. 72 of 2021

I. PENDAHULUAN

Kondisi balita pendek (stunting) ialah masalah gizi yang sangat serius khususnya dinegara-negara miskin dan berkembang. Di Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita stunting tertinggi. Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan maka dilaksanakan percepatan penurunan stunting. Stunting ialah gangguan pertumbuhan serta perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, tandanya ialah Panjang/tinggi badannya yang dibawah rata-rata.

Stunting bisa terjadi mulai janin dalam kandungan dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun (Eko Putro Sandjojo, 2017) penyebab terjadinya stunting ialah mal nutrisi yang menyangkut beberapa aspek yaitu asupan gizi yang tidak mencukupi pada bayi, kesulitan akses pada pangan yang sehat, kurangnya pengetahuan serta fasilitas kesehatan ibu dan anak. Balita yang mengalami stunting mempunyai resiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas serta resiko mengalami penyakit degenerative dimasa mendatang.

Stunting senantiasa mengintai anak-anak pelosok salah satunya di Kabupaten kepulauan Mentawai yang kekurangan asupa nutrisi, pola asuh hingga pernikahan dini turut andil atas kasus stunting disamping determinan lainnya. Selain diatur dalam Undang-undang kesehatan, kebijakan terkait pencegahan stunting juga diatur dalam peraturan turunannya yaitu PP RI no. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting (selanjutnya disebut PerPres no.72 tahun 2021 percepatan penurunan stunting) yang bertujuan guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Percepatan penurunan stunting dilakukan dengan holistic, integrative dan berkualitas yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara lembaga.

Kabupaten Kepualan Mentawai pada tahun 2021 kasus stunting berada diposisi keenam dengan prevalensi 27,3% dan pada tahun 2023 yaitu 19,3% tercatat meningkat turun usai dilakukan penimbanagn masal mulai agustus hingga oktober 2023. Sementara target pemerintah percepatan penurunan stunting harus mencapai 14% di tahun 2024. Stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong tinggi dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 14%. Perlunya perhatian bagi pemerintah daerah dalam penanganan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama didaerah Betumonga sebesar 42,9%.

Banyaknya masyarakat didaerah pelosok Kepulauan Mentawai yang menderita stunting seperti Betumonga ini diakibatkan karena masih banyak masyarakat kekurangan gizi dikarenakan kondisi masyarakat yang cenderung miskin, kemiskinan ini yang menyebabkan masyarakat memiliki gizi yang tidak cukup selama kahamilan dan kelahiran anak. Lokasi atau letak geografis pulau pun menjadi salah satu penghambat pihak terkait dalam membantu permasalahan stunting bagi masyarakat yang terdampak disebabkan akses sulit dan jauh untuk dijangkau serta transportasi yang terbatas sehingga penyuluhan dan bantuan yang diberikan bidan/pihak terkait tidak merata, keterbatasan itu yang membuat masyarakat disana memiliki pola asuh yang tidak benar atau sesuai serta latak belakang pendidikan orangtua yang cenderung rendah.selanjutnya tidak hanya itu sumber mata pencaharian yang rencah dan hanya mengandalkan dari alam saja seperti nelayan dan bertani sehingga motivasi masyarakat Mentawai untuk maju sangat rendah. Para orangtua didaerah polosok Mentawai seperti Betumonga dll yang memiliki berpendidikan rendah, cenderung pemalas sehingga masyarakat disana mayoritas dengan perekonomian yang rendah sehingga gizi anak tidak terpenuhi dengan baik. Tidak hanya bicara soal makanan

pokok saja air minum pun menjadi bagian penting dalam kesehatan dimana bisa dilihat disana kondisi sanitasi air masih kurang bagus.

Implementasi perlu dilaksanakan untuk melihat apakah aturan atau kebijakan sudah terlaksana secara menyeluruh, dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum begitu optimal dilakukan dikarenakan berbagai permasalahan yaitu belum optimalnya sosialisasi dan mobilisasi terkait pencegahan stunting karena sulitnya menjangkau masyarakat yang berada di beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pendidikan masyarakat yang tergolong rendah sehingga kemampuan masyarakat dan menerima program yang dilakukan bidan menjadi rendah, dan keterbatasan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai masih bergantung pada alam sehingga faktor ekonomi yang membuat ibu pada masa kehamilan kurang asupan gizi serta fasilitas kesehatan yang masih minim.

Berdasarkan permasalahan diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kepulauan Mentawai”.

II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan . Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan pada suatu sistem ialah implementasi.

Implementasi ialah suatu tahapan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga serta organisasi yang bertanggungjawab. Implementasi kebijakan jika diartikan secara luas ialah untuk melihat apa yang terjadi antara penetapan suatu tujuan dan kepastian untuk menjalankan atau berhenti melakukan dan dampak dari kegiatan tersebut (Faturahman, 2018).

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Menurut Teori Merilee S. Grindle (Dalam Harbani Paslong 2009:645) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor besar yakni : isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

a. content of policy Menurut Grindle adalah :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
2. Type of benefits (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target groups. Contoh : masyarakat di wilayah slum areas (daerah kumuh) lebih suka menerima program air bersih dan perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor .
3. Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan) contoh : program yang tujuannya mengubah sikap serta perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada masyarakat miskin.
4. Site of decision making (letak pengambilan keputusan) apakah letak suatu program telah tepat di suatu lembaga.
5. Program implementer (pelaksana program) apakah suatu kebijakan sudah menyebutkan implementornya/pelaksananya dengan rinci.

6. Resources committed (sumber-sumber daya yang dipakai) apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai.
- b. Context of implementation Menurut Grindle ialah :
 1. power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) artinya seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat pada implementasi kebijakan.
 2. Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga serta rezim yang berkuasa) artinya karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 3. Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan terdapatnya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan serta responsivitas kelompok sasaran kebijakan.

Dari beberapa definisi diatas bisa diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan serta sasaran kebijakan
2. Adanya kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan

C. Pengertian Stunting

Stunting ialah masalah kurang gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik serta kognitif yang optimal. Anak stunting memiliki Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal (Kemenkes RI, 2018).

Stunting didefinisikan sebagai keadaan dimana status gizi pada anak menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score = ≤ -2 SD, hal ini menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. Stunting pada anak juga menjadi faktor risiko terjadinya kematian, masalah perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan adanya ketidakseimbangan fungsional (Anwar, Khomsan, dan Mauludyani, 2014).

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan memakai metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang dipakai pada penelitian berdasarkan pada sebuah perbaikan yang ingin dilakukan yang kemudian diterapkan untuk melakukan penelitian pada kondisi lingkungan terjadinya sebuah masalah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Steven Dukeshire & Jenifer mengatakan penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang berhubungan dengan data bukan angka, data tersebut berbentuk sebuah cerita atau suatu kejadian yang kemudian dikumpulkan serta dianalisis.

2. Teknik Analisa Data

Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung sampai pengumpulan data selesai dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Peneliti harus mampu menganalisis jawaban dari narasumber atau yang diwawancarai pada waktu wawancara berlangsung. Namun apabila analisa pada

jawaban dari narasumber menurut peneliti belum memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan selanjutnya sampai peneliti sudah merasa cukup dan puas dengan jawaban yang diberikan oleh orang yang diwawancarai, setelah itu baru didapat data yang dianggap benar dan dapat dipercaya. Miles and Huberman 1984 (dalam Sugiyono 2020) mengatakan bahwa menganalisis data kualitatif dilaksanakan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya telah jenuh.

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan data yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data bisa juga disebut sebagai sebuah rangkuman, reduksi data ialah proses yang dilaksanakan untuk memilih hal pokok dan dirasa penting dan sebagai informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan dengan jelas dan memberi kemudahan kepada peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan pencarian data selanjutnya. Reduksi data dapat dilaksanakan dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu dengan memakai komputer.

b. Penyajian data

Penyajian data baru dapat dilaksanakan setelah reduksi data. Penyajian data pada penelitian kualitatif bisa berbentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Data yang telah diperoleh sebelumnya kemudian disajikan dan diurutkan dalam sebuah hubungan yang saling berkaitan sehingga semakin mudah untuk dipahami. Miles and Huberman 1984 (Sugiyono 2020) mengatakan pada penelitian kualitatif penyajian data biasanya menggunakan sebuah teks yang menceritakan suatu kejadian atau permasalahan yang terjadi. Peneliti akan mudah memahami kejadian yang terjadi dengan mengurutkan data tersebut, yang kemudian dipakai untuk merencanakan kegiatan yang ingin dilakukan selanjutnya berdasarkan yang sudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Sesudah dilaksanakan penyajian data, yang selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan/Verifikasi. Kesimpulan yang ditemukan peneliti pada tahap awal masih bersifat sementara, jika tidak ditemukan lagi bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap berikutnya maka kesimpulan awal akan berubah. Tetapi, jika kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung dengan bukti yang kuat dan valid dan tetap maka peneliti bisa kembali kelapangan untuk pengumpulan data selanjutnya, dengan itu kesimpulan tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Penarikan kesimpulan dilakukan menurut hasil dari analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. (Sugiyono 2020).

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan latar atau skenario yang memiliki isu yang sedang diteliti secara menyeluruh dan metodis berdasarkan peristiwa terkini. Teknik pengambilan sampel secara sengaja digunakan untuk mengidentifikasi informan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, individu atau aktor yang menguasai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti disebut informan. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Pendekatan triangulasi

digunakan dalam teknik penilaian validitas data. Reduksi data, pengujian data, dan pengambilan kesimpulan dilakukan sebagai tambahan pendekatan analitik data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perpres no 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Indikator pencapaian yang pertama adalah indikator pencapaian pada bagian perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari 7 indikator tentang Perpres no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya Daerah Betumonga antara lain sebagai berikut:

Target indikator perencanaan dan penganggaran

No	Indikator	Target	Capaian
1	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	100%	100%
2	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting pada dokumen perencanaan serta penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	100%	100%
3	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	100%	100%
4	Persentase kab/kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya.	100%	100%
5	Persentase kab/kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif.	100%	100%
6	Persentase kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.	100%	90%
7	Persentase desa yang meningkatkan alokasi APBDDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun	100%	100%

	sebelumnya.		
--	-------------	--	--

Sumber : wawancara 2024

Berdasarkan data diatas hasil wawancara dengan Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai Bapak Martinus D. capaian perencanaan dan anggaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas tercapat sesuai target Perpres no 72 tahun 2021. Dari total 7 indikator pencapaian perencanaan dan pembangunan terkait percepatan penurunan stunting, sudah terpenuhi dengan baik 6 dari 7 indikator pencapaian terkait perencanaan dan penganggaran. 1 indikator tersebut kurang terpenuhi karena Kabupaten Kepulauan Mentawai daerah Betumonga memiliki wilayah yang luas dan terpencil sehingga sulit diakses secara keseluruhan. Maka dengan demikian bias diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mengimplementasikan dengan baik terkait perencanaan dan pembangunan percepatan penurunan stunting sebagaimana tercantum pada Perpres 72 tahun 2021. Ini menjadi tolak akur agar kedepannya target perencanaan serta penganggaran bisa terlaksana dengan baik. Hasil ini sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Marille A Grindle yaitu : isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Pilar 2 Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian	
		Target	Tercapai
1	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) mengenai pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	90%	90%
2	Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan dikabupaten/kota	90%	50%
3	Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	90%	90%
4	Persentase anak berusia di bawah limatahun	90%	70%

	(balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.		
5	Persentase keluarga yang melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	70%	50%
6	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	90%	50%
7	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	70%	40%
8	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melakukan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	90%	90%
9	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	2	1
10	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	3	25
11	Terpenuhi standar pelayanan pemantauan tumbuh Kembang diposyandu.	90%	90%
12	Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan.	100%	100%
13	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar	100%	100%

Sumber : wawancara 2024

Berdasarkan data diatas bias dilihat 13 pilar masih banyak yang belum tercapai dari target yang ditentukan oleh perpres no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai daerah Betumonga. Dari 13 indikiator ada 5 target yang belum tercapai. Kurangnya tenaga pengajar untuk anak usia dini dan masyarakat yang menolak pola hidup sehat dikarenakan kurangnya pengetahuan dengan dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Marille A Grindle kurangnya pencapaian dalam isi kebijakan (content of policy) seperti Tipe Manfaat yang mana masyarakat menolak dengan program yang diberikan dan lingkungan implementasi (context of implementation) seperti Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan terdapatnya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan serta responsivitas kelompok sasaran kebijakan. Banayak masyarakat tidak taat dalam edukasi yang diberikan oleh pihak terkait.

Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa

No	Indikator Pilar 3 Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Pusat, Daerah, dan Desa	Capaian	
		Target	Tercapai
1	Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting.	90%	90%
2	Cakupan calon PUS (Pasangan Usia Subur) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah.	90%	50%
3	Cakupan Catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	90%	100%
4	Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	70%	45%
5	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	90%	50%
6	Persentase membutuhkan pelayanan keluarga berencana.	80%	80%
7	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting.	1	1
8	Persentase pelaksanaan audit kasus	n/a	100%
9	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	n/a	100%
10	Cakupan CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	90%	50%
11	Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	100%	100%
12	Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting.	100%	50%
13	Cakupan keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial.	100%	50%

14	Persentase catin anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD).	90%	60%
15	Persentase caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD).	90%	90%
16	Persentase catin yang mendapatkatalaksana kesehatan dan gizi.	90%	60%
17	Persentase caPUS yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	90%	90%
18	Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat(PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan.	90%	80%
19	Persentase Ibu hamil yangmenerima pendampingan.	90%	90%
20	Persentase ibu hamil yangmengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan.	80%	80%
21	Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan giziburuk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk.	100%	100%
22	Persentase keluarga berisiko Stunting yangmemiliki rumah layak huni.	70%	50%
23	Persentase keluarga berisiko Stunting yangmempunyai jamban sehat.	80%	60%
24	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mengakses air minum layak.	98%	50%
25	Persentase keluarga dengan anak 6 – 23 bulan yangmendapatkan MP-ASI.	80%	70%
26	Persentase keluarga dengan anakusia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkatalaksana kesehatan dan gizi.	90%	90%
27	Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	100%	100%
28	Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan.	90%	90%
	Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan		

29	pendampingan.	90%	80%
30	Persentase keluarga dengan anakusia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	90%	70%
31	Persentase desa yang minimal memiliki 1 TPK (tim Pendamping keluarga).	90%	90%
32	Persentase TPK yang mendapatkan orientasi.	90%	90%
33	Persentase anak usia 24-59 bulandengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk.	90%	90%
34	Persentase anak usia 24-59 bulandengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan.	90%	90%
35	Persentase Balita 0-23 bulandengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard.	90%	70%
36	Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard.	90%	90%
37	Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan panjang/tinggi badan sesuai standard.	90%	85%
38	Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard.	90%	90%

Sumber : wawancara 2024

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan dari 38 indikator terdapat 12 indikator yang belum tercapai maksimal dengan target yang diharapkan pemerintah. Ini disebabkan masih banyak pola hidup yang tidak sehat yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai daerah Betumonga seperti air minum yang kurang sehat, lokasi jamban yang sembarangan dan makanan pendamping ASI yang kurang serta banyaknya pasangan yang menikah usia dini sehingga kurang perhatian terhadap kesehatan sebelum menikah sehingga berisiko stunting. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai daerah Betumonga yang begitu luas serta daerah yang sulit dijangkau banyak masyarakat yang terkadang malas untuk melakukan pemeriksaan. Dari teori yang disampaikan oleh Merilee

S. Grindle yaitu isi kebijakan (content of policy) masih banyak yang belum tercapai seperti Type of benefits (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target groups. dan lingkungan implementasi (context of implementation) yaitu Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan serta terdapatnya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan.

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat

No	Indikator Pilar 4 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Capaian	
		Target	Tercapai
1	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai.	90%	70%
2	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	90%	75%
3	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	50%	-
4	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	90%	100%
5	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan/atau anak balita yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)	90%	100%
6	Persentase pengawasan produk pangan yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.	75%	-
7	Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal.	90%	90%
8	Persentase ibu hamil KEK (Kekurangan Energi kronis) yang menerima tambahan asupan gizi.	90%	80%
9	Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	80%	80%
	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi		

10	kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	80%	80%
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan	90%	60%

Sumber : wawancara 2024

Berdasarkan data diatas banyak pilar yang masih belum terpenuhi di Kabupaten Kepulauan Metawai daerah Betumonga seperti lingkungan yang masih kotor dengan pekarangan yang tidak bersih sehingga berisiko stunting dan gizi buruk dan kurangnya perhatian bagi pelaku usaha dalam pengawasan produk yang dihasilkan. Sehingga makanan yang dikonsumsi belum tentu higienis. Dari 11 indikator ada 5 indikator yang belum tercapai. sesuai dengan kebijakan yang disampaikan oleh Marille A Grindle Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan masih belum terlaksana dengan baik. Ini menjadi acuan dalam tahun selanjutnya agar pencapaian target ini tercapai secara maksimal.

Pemantauan dan evaluasi

No	Indikator Pilar 5 Pemantauan dan Evaluasi	Target	Tercapai
1	Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	n/a	65%
2	Terselenggaranya audit anak berisiko di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	n/a	70%
3	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	n/a	50%
4	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	n/a	60%
5	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa.	n/a	80%

Sumber : wawancara 2024

Berdasarkan data diatas bias dilihat belum maksimalnya evaluasi kinerja yang dilaksanakan baik itu ditingkat kabupaten maupun ditingkat desa Betumonga. Ini merupakan menjadi tugas khusus pada pencapaian target. Agar capaian sesuai

dengan prepres no 72 tahun 2021. Dari 5 indikator terdapat 4 indikator yang belum tercapai maksimal. Sesuai teori atau kebijakan yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle yaitu isi kebijakan (content of policy) mengenai Resources committed (sumber-sumber daya yang dipakai) apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai, ini disebabkan keterbatasan transportasi dengan akses wilayah yang jauh sehingga pemantauan serta evaluasi tidak terlaksana secara maksimal dan lingkungan implementasi (context of implementation) isi kebijakan mengenai power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) artinya seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat pada implementasi kebijakan yaitu kurangnya pemantauan dilapangan sehingga menjadikan target pencapaian kurang maksimal

Pilar Tambahan

No	Indikator Pilar Tambahan	Capaian	
		Target	Tercapai
1	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	90%	80%
2	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materipencegahan Stunting	90%	85%
3	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	0%	0%
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100%	70%
5	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (jiwa).	100%	100%
6	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	n/a	100%
7	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	n/a	100%

Implementasi Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai

8	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	100%	100%
9	Persentase target sasaran yang mempunyai pemahaman yang baik mengenai stunting di lokasi prioritas	100%	100%
10	Publikasi data stunting tingkatKabupaten/Kota	1	1
11	Tersedianya bidan desa/kelurahansesuai kebutuhan		100%
12	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting		100%
13	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah		100%
14	Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80%	80%
15	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).		100%
16	Persentase anak berusia di bawahlima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana giziburuk.	100%	100%
17	Persentase anak berusia di bawahlima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	96%	96%
18	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	100%	100%
19	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100%	100%
	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data	100	100%

20	surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	%	
21	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha		
22	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting.		100%

Sumber : wawancara 2024

Berdasarkan data diatas maka bias disimpulkan peran pemerintah pada percepatan penurunan stunting sudah dilakukan tetapi beberapa pilar tidak terpeuhi dengan baik sehingga bertambahnya angka stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari 22 pilar terdapat 2 pilar yang belum terpenuhi secara maksimal dan peran Pemerintah sudah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis implementasi PP No. 72 tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya di daerah Betumonga, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Masih ada beberapa faktor kebijakan belum terlaksana secara maksimal Seperti: kejadian tersebut disebabkan karena masih kurangnya program berkelanjutan terutama pada daerah terpencil yang sulit didatangi disebabkan dengan jangkauan yang luas sehingga akses transportasi terbatas.
2. Sebagai upaya penanganan stunting pada PP nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting untuk menangani kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai daerah Betumonga. Kurangnya program tersebut diantaranya adalah belum adanya program penanganan stunting terkait faktor determinan penyebab stunting diantaranya air bersih, sanitasi dan juga kelayakan lingkungan untuk keluarga beresiko stunting khususnya padakasus khusus seperti daerah terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan juga program tambahan untuk pencegahan stunting yang disebabkan oleh penyakit TBC pada anak-anak akibat dari lingkungan yang terkontaminasi asap rokok.

B. Saran

Saran yang bias diberikan oleh penulis terkait Implementasi Perpres nomor 72 tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah perlunya aturan atau upaya tambahan dalam penanganan kasus stunting terkait faktor determinan penyebab stunting untuk keluarga beresiko stunting khususnya pada kasus khusus seperti daerah Betumonga serta aturan tambahan untuk pencegahan stunting yang disebabkan oleh TBC dikarenakan lingkungan yang terkontaminasi asap rokok.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2004. (Edisi Revisi) Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Alfabeta cv.
- Abdulah, Fitri, A. H., Gistituati, N., Studi, P., Ilmu, D., Padang, U. N., & Indonsesia, Anggreni, D., Lubis, L. A., & Kusmanto, H. 2022. Implementasi program pencegahan stunting di puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*.
- Edward III, George C.1980. *Implementing Public Policy*.Washington DC: Congresional Quarterly Press
- Eko Putro Sandjojo 2017. *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*: Jakarta Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi.
- Eli Kusnaeli, D. (2021). *Demi Keluarga Pahami Langkah Penting Cegah Stunting*.
- Faturahman, B. M. 2018. *Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik*. Publikasi Jurnal Universitas Brawijaya.
- Kementerian kesehatan. 2021. *Buku saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*.
- Kementrian Desa. 2017. *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*.
- Pressman, J.L dan Aaron Wildavsky. 1973. *Implementation: How Great Expectation in Washington Are Dased in Oakland*, London: California Press.
- Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela. ISSN 2088 - 270 X.
- Situmorang, L. S. 2023. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*.

PP

- Peraturan Presiden. 2021. *Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- PPN/Bappenas, K. 2018. *Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota*